

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis mengenai *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan 4 (empat) dimensi fokus penelitian yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses *collaborative governance* yang selama ini dilakukan dalam pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Semampir sudah berjalan baik. Hal tersebut dikarenakan beberapa dimensi yang ada dalam proses *collaborative governance* sudah terpenuhi. Proses tersebut diawali dengan adanya kegiatan tatap muka yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* mulai dari pemerintah, swasta, juga masyarakat. Kegiatan tatap muka tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan juga menyatukan pendapat antar *stakeholders* yang terlibat dalam Program Padat Karya.
2. Kondisi awal yang terjadi dalam pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya antara lain adanya komitmen yang kuat dari Walikota Surabaya yang ingin menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya. Kemudian minimnya sumber daya baik SDM maupun anggaran dari APBD menyebabkan pemerintah kota Surabaya

harus berkolaborasi dengan OPD lain serta menggandeng pihak swasta dan masyarakat dalam menjalankan Program Padat Karya.

3. Desain kelembagaan yang ada dalam Program Padat Karya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya diturunkan menjadi Peraturan Walikota Surabaya No 83 Tahun 2023 yang mengatur tentang Program Padat Karya Di Kota Surabaya. Setelah Peraturan Walikota Surabaya ditentukan beberapa *stakeholders* yang akan menjalankan program tersebut. *Stakeholders* meliputi Bappedalitbang Kota Surabaya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, OPD pengampu sesuai program, Kecamatan, Kelurahan, serta pihak swasta yang terlibat.
4. Kepemimpinan fasilitatif yang dilakukan oleh Walikota Surabaya karena beliau yang menginisiasi Program Padat Karya. Melalui Bappedalitbang yang melakukan perencanaan dan mengatur kegiatan Padat Karya. Bappedalitbang mampu mengajak berbagai *stakeholders* lain untuk ikut berpartisipasi dalam Program Padat Karya, serta memberikan fasilitasi tempat untuk melaksanakan rapat forum.
5. Proses kolaboratif yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* sudah cukup baik. Terlihat dari kelima dimensi proses kolaboratif yang terlaksana.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan

Yaitu meningkatkan forum koordinasi dan komunikasi lintas sektor yang melibatkan dinas, kecamatan, kelurahan, pihak swasta, serta masyarakat miskin agar perencanaan program padat karya lebih terarah.

2. Optimalisasi pemanfaatan data dan mendorong partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan

Melakukan pembaruan data wilayah sasaran, data pengangguran, dan kondisi infrastruktur untuk memastikan program padat karya tepat sasaran dan relevan juga melibatkan perwakilan kelompok masyarakat seperti RT dan RW dalam musyawarah perencanaan kegiatan padat karya.

3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kolaboratif

Membentuk tim monitoring yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pendamping program, dan perwakilan manfaat. Hal tersebut penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.